

<b>LEMBAR JAWABAN ANALISIS KASUS</b>
--

**Nomor Assessee : 12**

**Nama Assessee : Muhammad Nur ILahi Bakti. NS**

**Tanggal : 04 Oktober 2021**

Disiplin kerja pegawai pemerintahan terutama perilaku indisipliner ASN serta sanksi yang diberikan

Birokrasi selalu berkaitan dengan pembinaan sumber daya manusia dalam pemerintahan dan karenanya akan timbul pergeseran paradigma dalam pelayanan publik yang secara otomatis menciptakan perubahan sistem dalam hukum kepegawaian meliputi penataan kelembagaan birokrasi pemerintahan, sistem, dan penataan manajemen kepegawaian. Pola pikir pengembangan hukum kepegawaian memiliki arti sebagai pergeseran paradigma dalam sistem pemerintahan untuk menjamin terselenggaranya tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna serta dalam upaya mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur baik material maupun spiritual.

Dalam hal ini ada beberapa permasalahan yang biasa terjadi dalam penerapan disiplin pegawai sebagai salah satu acuan menilai produktivitas kinerja pegawai yang dimana pegawai lebih banyak mengedepankan materi, uang, kekuasaan, dan jabatan saat bekerja, tanpa adanya upaya menunjukkan prestasi/ kinerja yang baik. Hal ini sebenarnya bukan merupakan hal baru karena sudah berlangsung sejak lama dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Kondisi yang demikian telah mendorong perilaku PNS untuk bekerja secara instant, malas-malasan, cenderung cari muka, dan mengutamakan pelayanan dengan melayani sedikit mungkin agar banyak waktu luang yang dapat digunakan untuk bersantai. Tidak ada semangat dalam menciptakan inovasi, kreasi, dan invensi yang tumbuh dari dalam diri PNS. Demikian pula dengan disiplin kompetensi dalam bekerja juga tidak diperhatikan yang kemudian berujung pada rendahnya produktivitas kerja dan capaian sasaran kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya.

Berkaitan dengan beberapa permasalahan tersebut untuk menyelesaikan kasus indisipliner pegawai dalam bekerja dapat dilakukan langkah-langkah baik dalam peningkatan mutu pegawai dengan pemberian pelatihan disiplin yang diadakan dengan melakukan pelatihan berkala disetiap dinas atau opd secara bergantian, bisa dilakukan 6 bulan sekali atau 1 tahun sekali sebagai bentuk usaha meningkatkan kualitas pegawai dalam hal

mengemban tugas dan lebih memahami tugas tanggungjawabnya sebagai Aparatur Sipil Negara atau ASN yang berintegritas. Adapun dalam bentuk pelatihan tersebut juga bisa dilakukan sesi pemahaman kembali terkait aturan dan disiplin pegawai yang tertera dalam Undang-Undang ataupun Peraturan daerah setempat sehingga dengan hal ini pegawai yang mungkin belum sama sekali tahu terkait aturan jika menjadi pegawai negeri dan sanksi apa saja yang akan diteima jika melanggar atau melenceng dari sebuah aturan tersebut dan pegawai yang sudah tahu akan bisa memahami ulang aturan tersebut. Selain dari itu bisa juga dilakukan pendekatan spiritual sesuai ajaran agama yang dianut oleh pegawai yang dimana tujuan dari hal tersebut ialah merefresh ulang pola pikir pegawai dengan perbuatan yang tidak baik yang sudah menjadi kebiasaan pegawai pada saat ini.

pemerintah Indonesia seharusnya memberikan perhatian untuk perbaikan manajemen kepegawaian dan peningkatan pelayanan publik yang dilakukan secara simultan, yang dalam hal ini bertujuan agar pegawai dapat lebih bekerja dengan baik dan juga bisa melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik pula. Sebagai langkah akhir bisa dilakukan dengan pemberian sanksi yang sepadan dengan pelanggaran yang dilakukan sebagai pemberian efek jera terhadap pegawai dan juga sebagai pembelajaran untuk pegawai lain yang ada di lingkup tersebut. Dalam hal pemberian sanksi tersebut sebaiknya tidak pandang bulu atau membedakan pegawai yang satu dengan yang lain dalam hal ini pemerintah yang bertugas dalam hal pengawasan dapat lebih bersikap netral. Perbaikan kinerja birokrasi pelayanan publik diharapkan akan mampu mengembalikan image pemerintah dimata masyarakat karena dengan kualitas pelayanan publik yang semakin baik, kepuasan dan kepercayaan masyarakat bisa dibangun kembali. Kalau ini dilakukan maka pemerintah akan memperoleh kembali legitimasi dimata publik.